BAB II
LANDASAN TEORI

2. 1 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

2. 1. 1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pengertian UMKM adalah sebuah bisnis yang dioperasikan oleh pelaku usaha secara individu, rumah tangga, ataupun badan usaha berskala kecil. Sedangkan berdasarkan Keppres RI No. 19 Tahun 1998, UMKM dianggap sebagai kegiatan ekonomi rakyat pada skala kecil yang perlu dilindungi dan dicegah dari persaingan yang tidak sehat. UMKM diatur dalam Undang-undang No 20 tahun 2008, lalu kemudian diatur dalam PP No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang sering disebut PP UMKM.

Sementara itu menurut PP No 7 tahun 2021 pasal 1, pengertian UMKM terdiri atas pengertian Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. Usaha Mikro merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah. Usaha Kecil merupakan suatu usaha ekonomi

produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Usaha Menengah merupakan suatu usaha ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan suatu usaha ekonomi produktif meliputi barang atau jasa yang dikelola oleh badan usaha ataupun perorangan dan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam lingkup mikro, kecil, dan menengah.

2. 1. 2. Karakteristik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Isnawan (2012) UMKM memliki beberapa ciri-ciri yakni:

a. Jenis barang/jasa yang diperdagangkan tidak tetap atau bersifat dan berubah karena dipengaruhi faktor-faktor tertentu.
b. Tempat usaha berpindah-pindah atau tidak menetap dalam satu tempat.
c. Dalam sisi pengelolaan administrasi keuangan masih sangat minim pelaksanaanya.
d. Tidak melakukan pemisahan keuangan usaha sebagai entitas yang berbeda dengan kepemilikan pribadi.
e. Sebagian besar terdiri dari sumber daya manusia yang belum memiliki jiwa wirausaha yang mempuni.
f. Tingkat pengetahuan terkait siklus bisnis terutama siklus akuntansi masih tergolong rendah.

g. Lebih memiliki akses terhadap lembaga non keuangan daripada lembaga perbankan.
h. Sebagian besar belum memiliki kelengkapan legalitas usaha, seperti dokumen izin usaha dan NPWP.

2. 1. 3. Klasifikasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM memiliki kriteria umum yang dibedakan berdasarkan jumlah sumber daya manusia, modal usaha dan total penjualan tahunan sebagai berikut:

a. Usaha Mikro
    1. Sumber daya manusia kurang dari 4 orang;
    2. Kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000,00 selain tanah dan bangunan tempat usaha;
    3. Total penjualan maksimal Rp300.000.000,00 satu tahun.
b. Usaha Kecil
    1. Sumber daya manusia antara 5 - 9 orang;
    2. Kekayaan bersih di atas Rp50.000.000,00 hingga Rp500.000.000,00 selain tanah dan bangunan tempat usaha;
    3. Total penjualan maksimal di atas Rp300.000.000,00 hingga Rp2.500.000.000,00.
c. Usaha Menengah
    1. Sumber daya manusia antara 20 - 99 orang;
    2. Kekayaan bersih di atas Rp500.000.000,00 hingga Rp10.000.000.000,00

selain tanah dan bangunan tempat usaha;

3. Total penjualan di atas Rp2.500.000.000,00 hingga Rp50.000.000.000,00 dalam satu tahun.

2. 2 Laporan Keuangan

2. 2. 1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan baik transaksi maupun kas. Pembuatan laporan keuangan perusahaan dilakukan dalam periode tertentu. Menurut Fahmi (2017) laporan keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan yang pada akhirnya dapat disimpulkan sebagai ringkasan kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu. Sedangkan menurut Murhadi (2019) laporan keuangan sesungguhnya adalah bahasa bisnis. Karena di dalamnya berisi informasi yang disusun secara rapi terkait kondisi keuangan perusahaan yang dibutuhkan oleh pihak pengguna dan pihak berkepentingan lainnya seperti pemerintah, manajer, karyawan, dan masyarakat.

2. 2. 2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Kieso dan Weygandt (2007), penyusunan laporan keuangan memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

a. Memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan keputusan investasi dan kredit dari pemilik suatu usaha.
b. Menampilkan dasar yang dapat menjadi pedoman dalam menilai arus kas masa depan suatu usaha.

2. 3 Standar Akuntansi Keuangan EMKM (SAK EMKM)

2. 3. 1. Pengertian Standar Akuntansi Keuangan EMKM (SAK EMKM)

UMKM dianggap dapat berperan besar dalam perekonomian Indonesia terutama dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan hal ini, pelaporan keuangan yang baik sangat dibutuhkan agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Keuangan (DSAK IAI) bertanggung jawab membuat standar untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan tersebut yakni dengan menerbitkan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada tahun 2009.

Standar ini dibuat untuk digunakan oleh entitas kecil dan menengah. Seiring dengan berkembangnya zaman, dan keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam hal penyusunan laporan keuangan, pada tahun 2016 DSAK IAI telah menyusun dan mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dan mulai berlaku efektif pada Januari 2018. Dibandingkan dengan SAK ETAP, SAK EMKM lebih sederhana dikarenakan mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh EMKM. Untuk melakukan pencatatan terhadap aset dan liabilitas, EMKM cukup mencatat sebesar biaya perolehan karena SAK EMKM menggunakan dasar pengukuran yang murni dengan menggunakan biaya historis.

2. 3. 2. Kebijakan Akuntansi menurut Standar Akuntansi Keuangan EMKM (SAK EMKM)

Berdasarkan PSAK 25 (2019), definisi dari kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan oleh entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Kebijakan akuntansi menurut SAK EMKM terdiri atas konsep pengakuan, pengukuran dan asumsi dasar.

2.3.3. Tujuan Laporan Keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan EMKM (SAK EMKM)

Berdasarkan SAK EMKM, Laporan Keuangan bertujuan untuk menunjukkan pertanggungjawaban manajemen yang memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan atau sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan mereka yang bersifat ekonomik yang di mana mereka tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan secara khusus untuk mereka gunakan dalam pengambilan keputusan tersebut

2.3.4 Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan EMKM (SAK EMKM)

SAK EMKM menyatakan bahwa laporan keuangan harus disajikan dengan penyajian wajar yang mensyaratkan jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

a. Relevan

   Informasi tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

b. Representasi Tepat

Informasi disajikan secara akurat dan tidak terdapat kesalahan yang material dan bebas dari bias.

c. Keterbandingan

Dapat membandingkan informasi dari suatu periode ke periode lainnya untuk dapat mengidentifikasi posisi keuangan dan kinerja keuangan.

d. Keterpahaman

Informasi yang disajikan mudah dipahami oleh pengguna.

Pada dasarnya penyusunan laporan keuangan UMKM jauh lebih sederhana dari laporan keuangan perusahaan dengan kategori besar. Umumnya laporan keuangan perusahaan dengan kategori besar terdiri dari 5 laporan, yakni Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Namun, dalam SAK EMKM, laporan keuangan UMKM memiliki jumlah minimum jenis laporan yang disusun, yakni terdiri dari:

a. Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi disebut juga sebagai Laporan Kinerja Keuangan Perusahaan atau Bisnis. Laporan laba rugi menyajikan tiga komponen utama yaitu pendapatan (*income*), pengeluaran/beban (*expense*), dan laba/rugi (*gain/loss*) selama satu periode.

1. Pendapatan (*Income*) mengacu keuntungan penjualan barang atau jasa dalam periode tertentu. Biasanya pendapatan yang tersaji dalam laporan adalah pendapatan yang dihasilkan dari penjualan tunai dan kredit.

2. Pengeluaran/Beban (*Expense*) mengacu pada biaya operasional yang terjadi di entitas dalam periode tertentu. Contoh dari beban adalah gaji, transportasi, anggaran pelatihan, utilitas, hingga pajak.
3. Laba/Rugi (*Gain/Loss*) mengacu pada laba bersih setelah dikurangi biaya dari pendapatan. Semakin tinggi angka pendapatan dibanding beban, maka keuntungan juga tinggi begitupun sebaliknya. Laba yang ditunjukkan dalam laporan keuangan terdiri dari pendapatan usaha dan pendapatan komperhensif lainnya, seperti selisih revaluasi aset tetap, perubahan nilai investasi, dan dampak transaksi laporan keuangan.

b. Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan disebut juga sebagai Neraca. Neraca merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi seputar aset, kewajiban, dan ekuitas dalam satu periode secara menyeluruh dan terperinci. Secara singkat, komponen Neraca dapat ditampilkan dalam persamaan: Aset = Kewajiban + Ekuitas. Setiap komponen dalam Neraca dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aset

   Aset adalah sumber daya perusahaan yang terdaftar secara hukum dan bernilai ekonomi. Misalnya bangunan, tanah, mobil, dan uang. Aset terbagi menjadi dua kategori yaitu, aset lancar (aset yang habis dipakai dalam 1 tahun atau kurang dari 1 tahun) dan aset tak lancar (aset yang habis dipakai lebih dari 1 tahun).

2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang perusahaan yang harus dibayarkan kepada pihak lain. Contoh kewajiban adalah pinjaman bank, pajak, piutang, pinjaman ke institusi. Kewajiban terbagi menjadi dua kategori yaitu, kewajiban jangka pendek (kewajiban yang jatuh temponya dalam 1 tahun atau kurang dari 1 tahun) dan kewajiban jangka panjang (kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun).

3. Ekuitas

Ekuitas adalah harta kekayaan perusahaan yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Modal akan bertambah seiring dengan bertambahnya investasi ke dalam perusahaan. Yang termasuk dalam modal adalah pendapatan tetap, modal saham, dan sebagainya. Kekayaan bersih perusahaan dapat dihitung dengan cara mengurangkan kewajiban dari total aset.

c. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan disusun berdasarkan penjelasan rinci terkait jenis laporan keuangan neraca, laba rugi, perubahan modal, dan arus kas perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan memiliki pemahaman baik terkait pengelolaan dana secara menyeluruh. Catatan atas laporan keuangan ini biasanya dibuat oleh perusahaan berskala besar guna pengungkapan informasi laporan keuangan yang memadai.